

SOLIDITAS KOALISI PARTAI POLITIK DI ARAS LOKAL PILPRES 2024

Sofyan Muhamd¹, Edy Supardi²

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: sofyanmuhamadmip@gmail.com

Abstrak

Kontestasi Politik di Negara Indonesia akan digelar pada tahun 2024 mendatang, walaupun masih tersisa dua tahun tetapi Gerakan manuver politik yang dilakukan oleh partai politik suda telah mewarnai panggung politik yang nantinya dihelat pada tahun 2024, dalam kontestasi demokrasi di Negara Indonesia adalah bagian dari salah satu bentuk Negara yang Mengimplementasikan System Presidensial, dalam system presidensial menggambarkan bahwa kekuasaan presiden ada batasannya. Dalam system presidensialisme kita menemukan yang Namanya koalisi partai politik dalam kanca politik di tanah air, koalisi merupakan penggabungan beberapa partai politik yang merespon agenda-agenda dalam suksesi kekuasaan di indonesia, oleh karena itu dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perhelatan pilpres 2024 dan penelitian ini untuk menggambarkan soliditas elite partai koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimana dalam koalisi partai diantaranya Partai Amanat Nasional, PPP, Golkar yang secara politik telah membentuk satu koalisi untuk menuju pada kontestasi politik di 2024. Dan Penelitian akan menggunakan motodologi kualitatif, dalam penelitian ini teori yang pakai untuk menganalisis permasalahan adalah teori kelembagaan partai politik.

Kata kunci: Soliditas; Koalisi Partai Politik; Pilpres 2024.

Abstract

Political Contest in the State of Indonesia will be held in 2024, although there are still two years left but the political maneuvering movements carried out by political parties have colored the political stage which will be held in 2024, in the democratic contestation in the State of Indonesia is part of one form of State that Implements the Presidential System, in the presidential system illustrates that the president's power has limits. In the presidential system we find what is called a coalition of political parties in the political arena in the country, the coalition is a merger of several political parties that respond to agendas in the succession of power in Indonesia, therefore in this study it is more focused on the 2024 presidential election and this study is to describe the solidity of the elite of the United Indonesia coalition party (KIB) where in the coalition of parties including the National Mandate Party, PPP, Golkar which politically have formed a coalition to head towards the political contestation in 2024. And the research will use qualitative methodology, in this study the theory used to analyze the problem is the institutional theory of political parties.

Key words: Solidarity, Political Party Coalition, 2024 Presidential Election.

Article History:

Received : 2025-06-15

Revised : 2025-06-30

Accepted : 2025-07-11

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan mulai diterapkan secara utuh pada pemilu 2004. Amendemen UUD 1945 telah berhasil mengantarkan pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial murni. Ditandai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Apabila dibandingkan dengan sebelum amendemen UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang banyak mengandung kelemahan dan distorsi ketika dipraktikkan sebelum amendemen UUD 1945.

Sebelum amendemen UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia sering dikatakan sebagai sistem semipresidensial.

Indonesia merupakan Negara yang menempatkan koalisi sebagai bagian kekuatan Partai Politik (Parpol) dalam pertarungan merebut kekuasaan baik pada pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Koalisi yang diciptakan diantara partai politik di Indonesia tidak kaku dan cenderung fleksibel, dikarenakan koalisi lebih mengutamakan pada kesamaan kepentingan bersama dalam memperoleh kekuasaan. Kekuatan koalisi yang dibangun partai politik pada pemilihan presiden berasal dari pada kekuatan penguasaan parlemen. Menjalan kontestasi Politik yang nanti diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, Partai politik suda melakukan safari politik untuk menggalan koalisi untuk memenuhi ambang batas 20% atau suara sah nasional 25%, dari sejumlah partai politik terdapat tiga partai politik yang suda membentuk poros koalisi yang dikenal dengan KIB di dalam KIB ini terdapat tiga partai politik yakni Golkar, PAN, PPP.

METODE PENELITIAN

Dalam jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus` (case studies) kualitatif, ada beberapa definisi mengenai pendekatan studi kasus (case studies) menurut Suharsimi (2002:120) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Kasus dalam penilitian ini adalah Soliditas Partai Koalisi Dalam Kontestasi Pilpres 2024.

Jenis Penelitian

Dalam penilitian ini peniliti menggunakan jenis data primer dan skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, sejalan dengan hal tersebut, Lofland (1984:47) bahwa sumber data utama dalam penilitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selibihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada lembaga yang berhubungan dengan penilitian.

Waktu dan Tempat Penelitian

Yang menjadi lokasi penilitian ini adalah di Papua Barat Daya di sekretariatn Koalisi Partai politik. Karena instansi ini memiliki posisi yang sangat strategis dan mempunyai tanggung jawab penuh dalam upayah mengembangkan, merawat dan mampu menetralsisir permasalahan internal koalisi partai.

Target/Subjek Penelitian

Dalam jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus` (case studies) kualitatif, ada beberapa definisi mengenai pendekatan studi kasus (case studies) menurut Suharsimi (2002:120) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Kasus dalam penilitian ini adalah Soliditas Koalisi Partai politik Dalam Kontestasi Pilpres 2024.

Prosedur

Dalam penilitian ini peniliti menggunakan jenis data primer dan skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, sejalan dengan hal tersebut, Lofland (1984:47) bahwa sumber data utama dalam penilitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selibihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada lembaga yang berhubungan dengan penilitian. Data sekunder ini merupakan data pendukung dan data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Macam data, bagaimana data dikum-pulkan, dengan instrumen yang mana data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengum-pulannya, perlu diuraikan secara jelas dalam bagian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah mejadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Bogdan & Biklen (1982). Dalam pandangan Moh Nasir (2009: 124) bahwa analisis data adalah untuk mengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Senada dengan apa yang diutarakan oleh Spradley dalam Sugiono (2011: 244) menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun adalah cara berfikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan atau dengan makna bahwa analisis untuk mencari pola.

Sehingga dalam analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang lain. (Robert dan Biklen: 1982: 257).

Dalam penelitian ini ada tiga metode analisis data menjadi pedoman dalam penulisan yang berdasarkan pada pendapat Huberman dalam Mukhtar (2013: 135) bahwa analisis data deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sama hal dengan apa yang kemukakan oleh Miles dan Huberman yang di kutip oleh Sugiono (2011: 246) yang membagi analisis data menjadi tiga komponen yaitu :

1. Reduksi data

Suatu tahapan untuk pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa yang lebih mendalam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Kedua pakar ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam metode ini permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan kesimpulan akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koalisi Partai Politik Indonesia

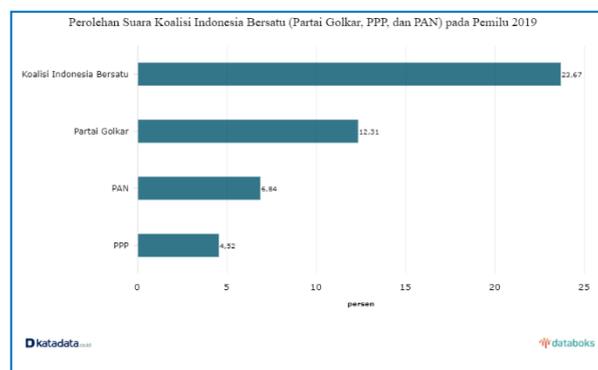
Dalam system Presidensil merupakan salah satu system politik yang di implementasikan oleh Negara Indonesia, dan didalam system Presidensil adalah salah satu system yang membatasi masa jabatan Presiden, dalam kontesasi politik di Negara Indonesia selalu diwarnai dengan yang Namanya koalisi partai politik. Bahkan dalam koalisi akan memebrikan tempat yang menguntungkan partai politik yang akan mengusun presiden terpilih, budaya koalisi partai politik yang dibangun oleh Negara Indonesia tidak terlepas dari pembentukan kabinet oleh presiden, menjelang kontestasi Pilpres di 2024 partai politik sudah memulai untuk menggalkan koalisi dalam pilpres mendatang salah satu koalisi partai terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau (KIB) didalam koalisi ini terdapat tiga partai politik yang suda tidak asing dalam percaturan politik di Negara Indonesia yaitu PAN, PPP, Golkar.

Andrew Wyatt dalam Jurnal Commonwealth & Comparative Politics menerangkan bahwa pembentukan koalisi partai politik harus didahului dengan pertimbangan mengenai kekuatan masing-masing [partai politik](#) yang menjadi anggotanya. Pertimbangan ini penting karena akan

sangat berpengaruh terhadap proses elektoral yang akan dijalani. Disamping itu jika kita melihat kekuatan masing-masing partai politik yang ada dalam koalisi Indonesia Bersatu secara electoral sangat kuat dan memiliki basis keanggotaan yang mumpuni, terlepas dari itu ungkapan yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam konferensi pers (5 Juni 2021 *Tempo.com*).

"Zulkifli mengatakan deklarasi koalisi baru akan dilakukan menjelang penutup alias Pemilu 2024 nanti. Komitmen yang sama untuk mengajak partai lain pun disampaikan Ketua Umum Golkar [Airlangga Hartarto](#) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Di sisi lain, koalisi juga tak menjelaskan banyak soal kemungkinan adanya koalisi lain di kemudian hari yang bisa memecah koalisi ini. "Ini ikhtiar, kalau sudah baik, insya Allah bisa dilewati," kata Zulkifli.

Partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dimana dalam koalisi ini terdapat tiga partai politik yang memiliki kursi DPR RI yang memenuhi syarat ambang batas threshold maka secara tidak langsung koalisi Indonesia Bersatu sangat berpeluang untuk mengusung calon presiden di 2024 mendatang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222 disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Hasil Pemilu 2019 Koalisi Indonesia Bersatu Partai Golkar memperoleh suara sebesar 12,31% dari total suara sah nasional. Sementara PAN sebesar 6,84% dan PPP sebesar 4,52%. Jika Total perolehan suara ketiga partai pengusung Koalisi Indonesia Bersatu tersebut sebesar 23,67%.



Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Soliditas Koalisi Partai Politik Daerah

Istilah soliditas dalam konteks ilmu politik telah dikembangkan beberapa pengertian. Sejumlah akademisi mengemukakan pandangan bagai mana memelihara soliditas, koherensi partai, dan pengurangan ketegangan dalam istitusi partai politik menjadi sangat penting sebab didalam tubuh partai politik terdapat subsistem, dalam konteks memelihara soliditas partai, seperti apa yang dikemukakan oleh Parson sebagai *"integrasi"* tujuan dari pandangan ini adalah demi menjaga soliditas di antara unit-unit untuk sebuah kepentingan agar dapat berfungsi secara efektif. (Noor:2015:25).

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tidak terlepas dari koalisi partai politik (Parpol), dalam kajian system Presidensial kemudian dikombinasikan dengan system multipartai, Pemilu merupakan satu keharusan, karena skema dalam presidensial dalam Pemilu di 2024 adalah mewajibkan partai politik untuk menggalang koalisi untuk memenuhi ambang batas

20%. Menghadapi Pemilu 2024 bahwa sejumlah partai politik telah melakukan Gerakan-gerakan manuver baik dalam mendeklarasikan capres yang diusung dan komunikasi politik lintas partai begitu intens dilakukan, dinamika politik saat ini tidak lain adalah mengara pada penajakan pembentukan koalisi Partai Politik di Pemilu 2024. Menghadapi Pemilu 2024 Partai PAN, PPP, dan Golkar lebih awal membentuk koalisi ketimbang partai-partai yang lain, dalam koalisi ini dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu) yang dibentuk tanpa melakukan deklarasi, dan Koalisi Indonesia Bersatu telah memenuhi ambang batas 20% untuk dapat mencalonkan presiden dari KIB itu sendiri, berikut ini konvrensi pers yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar :

"koalisi ini juga akan kompak menyusun strategi menuju kemenangan Pemilu 2024. Selain untuk menang di Pemilu, Airlangga beberapa kali menyebut kalau koalisi ini juga bertujuan untuk menghilangkan politik identitas di Tanah Air. (Tempo)".

Dari pernyataan diatas dapat kita menyimpulkan bahwa soliditas dalam internal koalisi sangat penting untuk dibangun sebab dengan adanya soliditas maka barang tentu akan lebih membuat koalisi tersebut dapat bertahan lama sampai pada pilpres 2024, tetapi dalam koalisi indonesia Bersatu dalam bursa capres siapa yang nantinya diusung sebagai capres ini juga masih menjadi sebuah percaturan politik di internal KIB apakah ketua umum Golkar, PAN dan PPP yang nanti di usung dalam pilpres di 2024 mendatang ataukah capres yang diluar dari koalisi indonesia Bersatu itu sendiri. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Ketua UMUM PPP [Suharso Monoarfa](#) dalam acara silaturahmi nasional Koalisi Indonesia Bersatu:

"Koalisi Indonesia Bersatu tidak alergi dengan capres dari luar koalisi namun dirinya berharap capres muncul dari dalam Koalisi Indonesia Bersatu (Tribunnews)."

Dalam Pemilu yang akan nanti dihelat pada tahun 2024 suda sangat ramai di bicarakan dan bukan hanya dikalangan partai saja tetapi para pengamat dan rakyat indonesia suda mulai untuk memperbincangkan pesta demokrasi tersebut, disamping itu safari politik yang selalu dibangun oleh partai politik merupakan sinyal bahwa Pilpres sebentar lagi akan dilaksanakan dan koalisi indonesia Bersatu dinilai masi terlalu dini untuk membangun koalisi pada ajang kontestasi politik masih 2 tahun lagi, dewasa ini, perkembangan politik mutakhir di indonesia telah diisi oleh sistem multipartai, dalam pembangunan koalisi tentu tidaklah mudah, karena ia menjelma Bersama platform ideologinya. Artinya bahwa ideologi partai politik menjadi sangat subsatnsial dan menjadi factor penentu dalam pembangunan koalisi.

"Terbentuknya KIB ini juga perlu dicermati. Dalam perspektif saya, bersatunya ketiga parpol ini tentu juga cukup jauh dari penggunaan ideologi parpolnya dan lebih menekankan pada aspek pragmatisme kekuasaan, karena proses kontestasi semata. Sedangkan, pembentukan koalisi semestinya harus mengutamakan apa yang telah disebut Firman Noor sebagai ideologically driven (Kompas, 2022)".

Sampai saat ini, belum ada garansi politik yang menjamin bahwa KIB akan tetap kokoh sampai pemilu usai. Dengan kata lain, komitmen dalam koalisi ini semestinya harus secara gamblang tertuang, agar akar koalisinya juga semakin kuat.



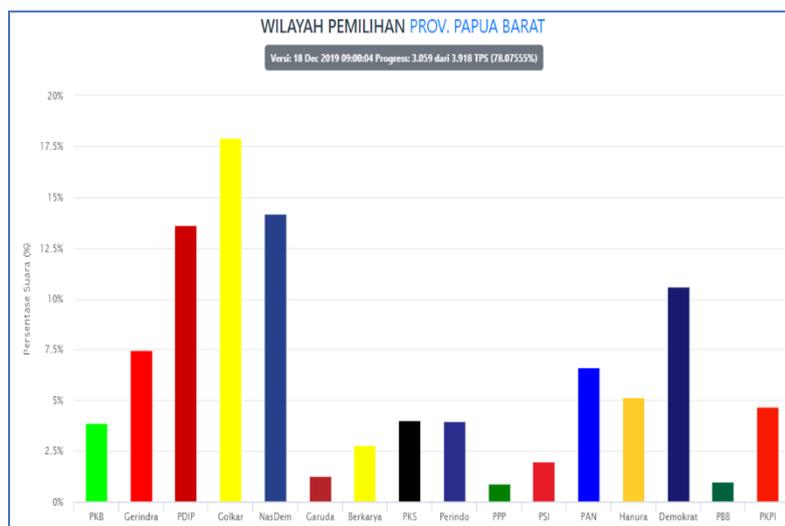
Ilustrasi Poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Pilpres 2024

Soliditas Koalisi Partai Politik Di Aras Lokal

Dinamika politik menyongsong Pilpres 2014 telah mengerucut pada konsolidasi dan pembentukan koalisi partai. Sejalan ini, terdapat tiga partai politik yang memutuskan untuk menggalang kerja sama yakni Golkar, PAN, PPP merupakan tiga partai politik yang duluan mengambil star dalam suksesi (Pemilu) 2024, dalam pembentukan koalisi ini merupakan satu keputusan yang lahir dikalangan elite partai ditingkat pusat maka koalisi ini menjadi tugas bagi pengurus pusat agar koalisi indonesia bersatu ini dapat diterima oleh pengurus partai yang ada ditingkat daerah demi menjaga soliditas partai itu sendiri. Partai Koalisi Indonesia Bersatu ditingkat daerah dalam hal ini Provinsi Papua Barat dari hasil Perolehan Kursi DPRD Provinsi Papua Barat Pemilu 2019 Partai Golkar memperoleh 8 kursi (103.012) Suara PAN (26.429) suara 3 Kursi Dan PPP (8.089) suara 2 Kursi total kursi dalam Koalisi Indonesia Bersatu di DPRD Provinsi Papua Barat berjumlah 13 Kursi dengan total akumulasi suara Partai Koalisi Indonesia Bersatu di Provinsi Papua Barat yaitu 137.530 suara. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Lambert Jitmau :

“Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang didalamnya terdapat Partai PAN dan PPP kami pengurus yang berada di daerah memberikan apresiasi walaupun durasi Pilpres masih cukup lama tetapi langkah yang diambil oleh DPP Partai Golkar ini merupakan satu keputusan politik yang terarah dan terukur karena dengan adanya koalisi indonesia Bersatu ini menandakan bahwa Golkar secara struktur partai telah siap untuk menghadapi pemilu di 2024. (papuabarot.antaranews.com).”

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh ketua DPD I Golkar Provinsi Papua Barat, menggambarkan bahwa secara internal Partai Golkar merespon secara positif terkait dengan insiasi DPP Partai Golkar dalam menggalang Koalisi dengan beberapa partai politik untuk menjemput Pilpres 2024 walaupun dalam koalisi KIB ini mebelum memutuskan siapa yang nantinya diusung sebagai calon Presiden. Setelah reformasi bergulir dan terlaksana Pemilu diawal reformasi merupakan satu momentum penting tentang demokratisasi di Indonesia. Terdapat dua poin penting dibidang politik diantaranya kebebasan mendirikan Partai Politik dan perubahan system Pemilu. Dari perubahan ini secara tidak langsung berimplikasi pada munculnya koalisi dalam dinamika Politik Indonesia.



Rekapitulasi Pileg 2019 Papua Barat (KPU) RI

Dari Hasil Rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 terdapat 26% suara yang dimiliki oleh Partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dimana Partai Golkar 17,5%, PAN 7,5 % dan PPP 1,10 %. Menjelang Pemilu 2014 Partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Provinsi Papua Barat Memiliki Modal Politik yang boleh dikatakan cukup baik maka dengan adanya kekuatan politik Koalisi Indonesia Bersatu harus bersifat terbuka baik ditingkat nasional dan daerah, sifat terbuka dalam artian KIB harus terus melakukan komunikasi politik dengan partai- partai yang belum bergaum dalam KIB, berikut ini respon yang lahir dari ketua DPW PAN Provinsi Papua Barat Rahmat Sinamur disalah satu media lokal:

“Dengan adanya Koalisi Indonesia Bersatu DPW PAN Papua Barat sangat mengapresiasi dengan hasil komunikasi Politik yang dilakukan oleh ketiga partai tersebut, tetapi untuk di tingkat daerah kami belum melakukan pertemuan secara resmi resmi dalam satu panggung deklarasi di level daerah (gardapapua.com/2022/08/13)”

Berhubungan dengan kemampuan menciptakan budaya atau sistem nilai yang khas, yang pada akhirnya akan dapat memberikan dampak positif kepada soliditas partai, sementara itu, otonomi keputusan merujuk pada tingkat kemandirian di dalam proses pengambilan keputusan internal, reifikasi merujuk pada keadaan dimana keberadaan partai tertanam dalam pikiran masyarakat. Basedau dan Stroh melakukan modifikasi dari teori pelemabagan yang dikembangkan oleh Randall dan Svasand, menurut mereka pelemabagan pada dasarnya merupakan upayah diseputar menghadirkan kestabilan (Stability) dan penyebaran nilai (value infusion) dalam sebuah partai. (Basedau dan Stroh:2008:7).

WILAYAH	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
PAPUA BARAT 1 (53,2%)	658	5.910	9.048	11.351	18.076	1.178	491	2.845	3.396	299	3.783	3.651	2.840	2.311	881	8.573
PAPUA BARAT 2 (100%)	5.373	9.330	16.114	14.931	11.620	515	2.367	5.157	2.676	1.074	566	6.666	2.626	10.649	1.478	5.291
PAPUA BARAT 3 (99,3%)	3.151	7.504	10.992	24.276	7.524	1.581	5.111	3.447	3.146	152	959	6.026	7.201	11.925	1.578	1.689
PAPUA BARAT 4 (62,1%)	2.345	4.905	6.844	10.828	8.748	1.491	2.275	3.422	726	101	971	5.723	3.154	11.802	92	2.242
PAPUA BARAT 5 (85,8%)	5.559	5.094	16.777	17.125	16.197	937	1.939	2.797	7.365	2.219	2.362	6.946	6.734	9.815	232	2.634

Sumber : KPU Provinsi Papua Barat

Perhitungan Hasil Pemilu 2019 memperlihatkan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di daerah pemilihan satu sampai daerah pemilihan lima di Papua Barat sangat signifikan, ara dan tujuan koalisi perlu untuk dirawat soliditasnya dengan baik berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh ketua DPW PPP Provinsi Papua Barat Yasman Yasir disalah satu media:

“Secara structural partai ditingkat lokal kami akan terus membangun komunikasi politik dengan teman-teman di PAN dan Golkar tujuannya untuk membentuk soliditas dalam koalisi KIB ini untuk PPP kami siap menghadapi Pilpres di 2024 mendatang (papua.com/)”.

Walapun banyak kalangan yang menyoroti bahwa terbentuknya koalisi ini terlalu terburu-buru tetapi antusias jajaran pengurus partai yang bergabung di KIB merespon secara positif dan partai koalisi ini harus terhindar dari perpecahan yang terjadi secara internal sebab Pemilu ini masih dua tahun baru dilaksanakan maka soliditas elita partai koalisi harus di rawat sebaik mungkin sampai pada level daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan adalah untuk meperkuat soliditas partai koalisi indonesia Bersatu yang perlu dilakukan adalah masing-masing partai politik yang tergabung dalam KIB ini perlu menyamakan persepsi sampai pada level kepengurusan di tingkat daerah agar kekuatan masing-masing struktur partai lebih maksimal menyosong pemilu 2014.

Saran

1. Partai Koalisi Indonesia Bersatu lebih intens membagan kordinasi ditingkat daerah sebagai bentuk soliditas dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu,
2. Koalisi Indonesia Bersatu Sifatnya terbuka untuk menjanging bakal calon presiden di berbagai kalangan baik dari internal Partai Koalisi maupun eksternal.
3. Partai Koalisi Indonesia Bersatu suda seharusnya mengsosialisasikan tujuan dan arah bentukan KIB ke pada public.

Reference

- Al-Hamdi, R., & Dyah Mely Anawati, S. I. P. (2021). Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014. Samudra Biru.
- Al-Arif, M. Y. (2015). Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 238-254.
- Arsil, F. (2017). Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak dan Presidential Treshold. *Jurnal Ketatanegaraan*, 5.
- Delviana, A. (2014). Anilisis Yuridis Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia. Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 160-172.
- Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 160-172.
- Hayat, H. (2016). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 468-491.
- Huntington, P. Samuel (2004). *Tertib Politi, Pada Masyarakat Yang sedang Berubah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muhamad, S. (2021). Perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar Pada Pemenangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1-10.
- Noor, F. (2015). *Quo Vadis Demokrasi Kita: Jakarta*, PT Wahana Semesta Intermedia.
- RISET, K., & TINGGI, T. D. P. IMPLIKASI MULTI PARTAI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA.
- Romli, L. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Kelima. Alfabeta. Bandung, 2014.
- Wospakrik, D. (2016). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 142-161.
- Winasih, N. W. I., Erawan, I. K. P., & Bandiyah, B. Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit terhadap Karakteristik Koalisi (Studi Kasus: Pilkada Serentak di Kabupaten Karangasem dan Tabanan 2015) (Doctoral dissertation, Udayana University).
<https://papuabarat.kpu.go.id/>